Katalog: 2302003.82

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN

PROVINSI MALUKU UTARA

AGUSTUS 2018

https://malut.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA

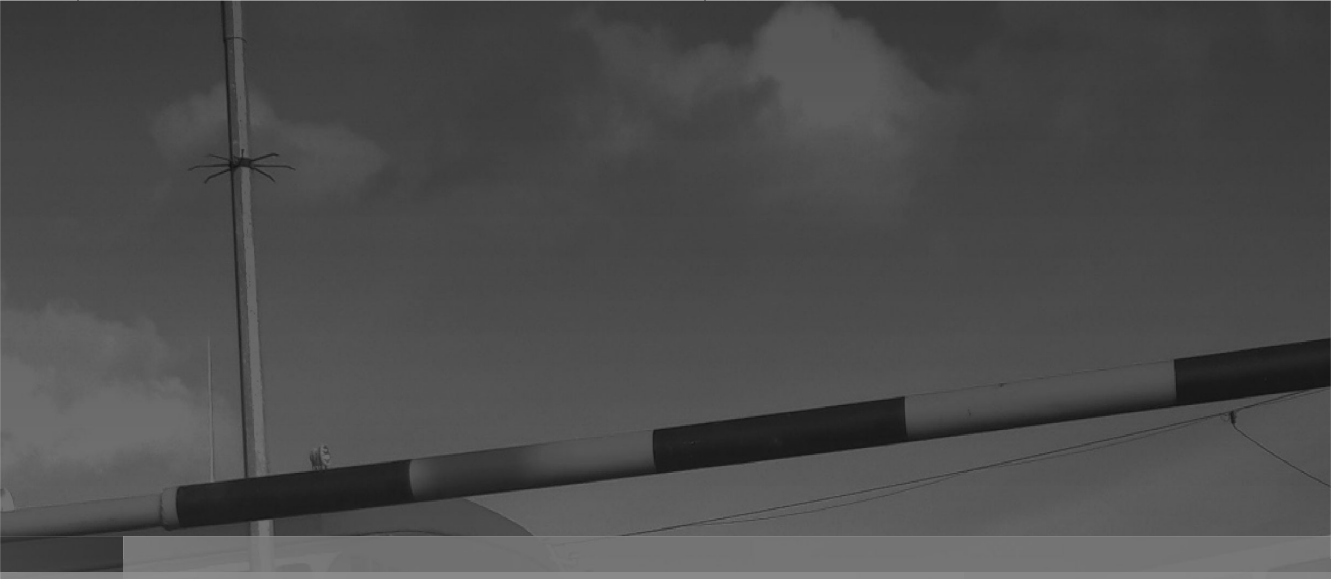

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN

PROVINSI MALUKU UTARA

AGUSTUS 2018

http://malut.bps.go.id

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN
PROVINSI MALUKU UTARA
AGUSTUS 2018

ISSN : 2654-9638
No. Publikasi : 82520.1901
Katalog : 2302003.82
Ukuran Buku : B5 ISO (17,6 x 25 cm)
Jumlah Halaman : vi + 26

Naskah:
Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Maluku Utara

Penyunting:
Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Maluku Utara

Desain Kover oleh:
Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Maluku Utara

Penerbit:
© BPS Provinsi Maluku Utara

Pencetak:
CV. Ardhani

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

https://maluku.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Tenaga kerja dan lapangan pekerjaan masih menjadi bahasan yang menarik di Indonesia. Terlebih jika dikaitkan dengan bonus demografi yang seharusnya punya potensi dan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Maka dari itu data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar ketenagakerjaan. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1976. Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/ data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Publikasi Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara Agusus 2018 merupakan publikasi yang berisi berbagai data dan informasi seputar ketenagakerjaan Maluku Utara pada bulan Agustus 2018. Publikasi ini menyajikan analisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan ketenagakerjaan serta potensi ketenagakerjaan yang ada di Maluku Utara.

Diharapkan dengan terbitnya publikasi ini, kebutuhan data ketenagakerjaan lebih mudah dipahami oleh pengguna data baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, diucapkan terima kasih.

https://malut.bps.go.id

Ternate, Februari 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara

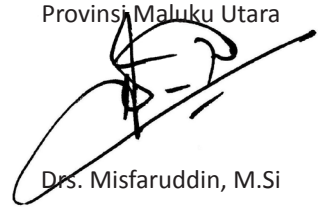

Drs. Misfaruddin, M.Si

https://malut.bps.go.id

DAFTAR ISI

UMUM	1
TUJUAN	2
CAKUPAN	2
PENJELASAN TEKNIS	2
PARTISIPASI DUNIA KERJA	3
PENDUDUK USIA KERJA YANG BEKERJA	6
INDIKATOR PENGANGGURAN	15
LAMPIRAN TABEL DAN GRAFIK	20

https://malut.bps.go.id

https://malut.bps.go.id

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PROVINSI MALUKU UTARA FEBRUARI 2018

UMUM

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar ketenagakerjaan di Maluku Utara. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Sakernas pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976, kemudian dilanjutkan pada tahun 1977 dan 1978. Pada tahun 1986-1993, Sakernas diselenggarakan secara triwulanan di seluruh provinsi di Indonesia, baru sejak tahun 1994-2001, Sakernas dilaksanakan secara tahunan yaitu setiap bulan Agustus. Pada tahun 2002–2004, di samping Sakernas Tahunan dilakukan pula Sakernas Triwulanan. Pada tahun 2005-2010, pengumpulan data Sakernas dilaksanakan secara semesteran pada bulan Februari (Semester I) dan Agustus (Semester II).

Jumlah sampel Sakernas Agustus 2018 Provinsi Maluku Utara sebanyak 256 blok sensus (2.560 rumah tangga).

Kemudian pada 2011-2014 Sakernas kembali dilaksanakan secara triwulanan, yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV). Sakernas Triwulanan ini dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan secara dini di Indonesia, yang mengacu pada KILM (*The Key Indicators of the Labour Market*) yang direkomendasikan oleh ILO (*The International Labour Organization*). Mulai tahun 2015, Sakernas dikembalikan lagi menjadi format semesteran, yaitu pada bulan Februari (semester I) dan Agustus (semester II) dengan jumlah sampel nasional sebanyak 50.000 rumah tangga dan estimasi data sampai level provinsi. Pada pelaksanaan Sakernas Agustus terdapat penambahan sampel sebanyak 150.000 rumah tangga, sehingga total sampel Sakernas Agustus adalah 200.000 rumah tangga dengan estimasi data sampai level kabupaten/kota.

Sampel terpilih untuk Sakernas Agustus 2018 di Provinsi Maluku Utara berjumlah 2.560 rumah tangga yang tersebar di 64 blok sensus. *Response Rate* pada Sakernas Agustus 2018 sebesar 93,51 persen. Dengan jumlah sampel tersebut estimasi yang disajikan adalah level level kabupaten.

https://malut.bps.go.id

TUJUAN

Tujuan penyusunan buku ini adalah menyajikan informasi indikator ketenagakerjaan hasil Sakernas Agustus 2018 dalam bentuk ulasan dan grafik serta tabel yang lebih ringkas untuk memudahkan pengguna data dalam memahami data-data pokok yang dihasilkan. Tabel yang lebih rinci juga disajikan pada lampiran.

CAKUPAN

Pembahasan hasil Sakernas Agustus 2018 dalam publikasi ini dibagi menjadi beberapa pokok bahasan yaitu partisipasi di dunia kerja, indikator tenaga kerja dan indikator pengangguran dengan rincian menurut jenis kelamin dan klasifikasi wilayah. Pembahasan juga dilengkapi dengan data tahun sebelumnya sebagai pembanding untuk melihat perkembangannya. Konsep ketenagakerjaan yang digunakan dalam publikasi ini mengacu pada konsep *International Conference of Labor Statistics (ICLS)* 13.

Publikasi ini menyajikan data dan ulasan partisipasi di dunia kerja, indikator tenaga kerja dan indikator pengangguran.

PENJELASAN TEKNIS

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO). Hal ini bertujuan untuk mengikuti standar internasional yang juga digunakan di negara lain. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

https://malut.bps.go.id

Gambar 1. DIAGRAM KETENAGAKERJAAN

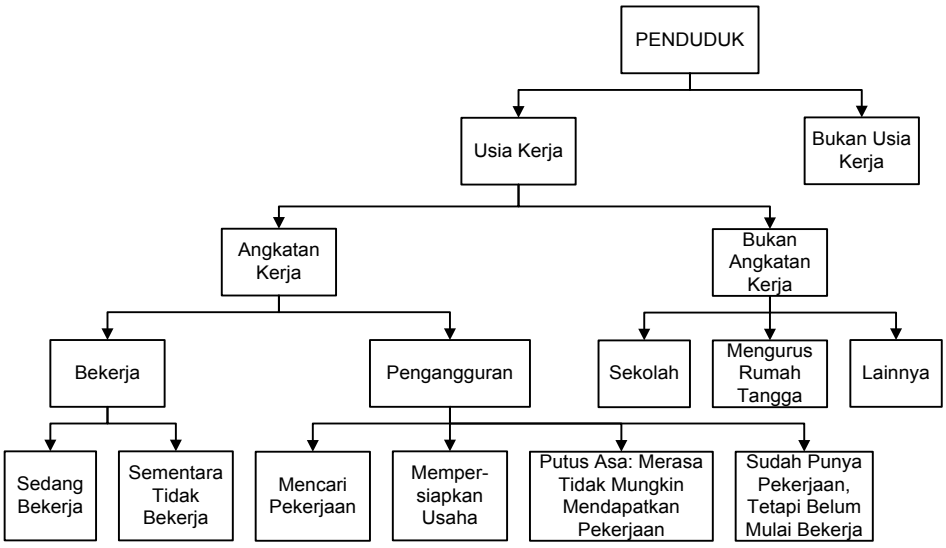

Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 5 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja. Di negara lain penentuan batas bawah dan batas atas usia kerja bervariasi sesuai kebutuhan/situasinya.

Periode referensi yang diterapkan dalam Sakernas adalah seminggu yang lalu yang berakhir satu hari sebelum pencacahan. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya.

PARTISIPASI DUNIA KERJA

Jumlah angkatan kerja menggambarkan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian yaitu mereka yang sedang bekerja, sementara tidak bekerja dan mereka yang menganggur.

TPAK dihitung dari perbandingan jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Data angkatan kerja disajikan menurut jenis kelamin dan klasifikasi wilayah untuk memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi.

https://malut.bps.go.id

Tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Oleh sebab itu, partisipasi penduduk dalam angkatan kerja cenderung berbeda jika dilihat antara beberapa variabel demografi.

TPAK dihitung dari persentase perbandingan jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Konsep Angkatan Kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, penduduk sementara tidak bekerja, dan penduduk yang menganggur. Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Gambar 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Kelamin, Agustus 2015-2018

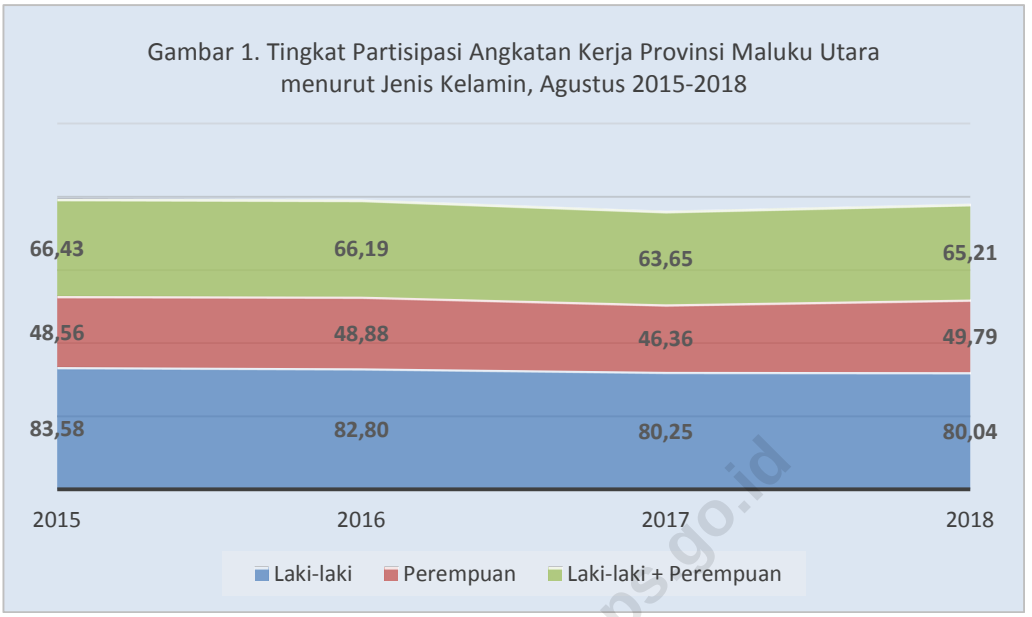

Ketersediaan tenaga kerja di Maluku Utara cukup memadai yaitu selalu diatas 60 persen dari penduduk usia kerja yang dimiliki. Pada Agustus 2018, TPAK Maluku Utara mencapai 65,21 persen, naik 1,56 poin dibanding tahun sebelumnya (63,65 persen). Angka tersebut mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Maluku Utara yang ikut berpartisipasi aktif dalam perekonomian sekitar 65 orang. Selebihnya melakukan kegiatan lain seperti: bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiun, atau melakukan kegiatan lainnya yang tidak bernilai ekonomis.

Pada Agustus 2018, TPAK Maluku Utara mencapai 65,21 persen, yang berarti terdapat sekitar 65 dari 100 orang penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi

Secara umum, partisipasi penduduk perempuan dalam dunia kerja cenderung lebih rendah dibanding penduduk laki-laki. Hal ini juga terjadi di pasar tenaga kerja Maluku Utara. Terlihat dari nilai TPAK dalam empat tahun terakhir, di mana TPAK laki-laki hampir dua kali lipat TPAK perempuan. TPAK laki-laki selalu diatas 80 persen, sedangkan TPAK perempuan berada di bawah 60 persen. Hal ini menjadi indikasi bahwa angkatan kerja di Maluku Utara banyak disumbangkan oleh penduduk laki-laki.

TPAK laki-laki pada Agustus 2018 lebih besar dibanding TPAK perempuan. Pada Agustus 2018 TPAK laki-laki sebesar 80,04 persen, turun 0,21 poin dibanding tahun sebelumnya (80,25 persen). Sementara itu, TPAK perempuan pada periode yang sama mengalami peningkatan sebesar 3,43 poin dari 46,36 persen pada Agustus 2017 menjadi 49,79 persen pada Agustus 2018.

https://malut.bps.go.id

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Klasifikasi Wilayah dan Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara, Agustus 2018

Klasifikasi Wilayah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	71,64	46,33	59,10
Perdesaan	83,48	51,24	67,75
Perkotaan + Perdesaan	80,04	49,79	65,21

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2018

Tabel 1 menyajikan keterangan tenaga kerja Maluku Utara berdasarkan klasifikasi wilayah. Proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja di wilayah perdesaan (67,75) lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan (59,10). Hal ini menunjukan bahwa pasar tenaga kerja di Maluku Utara banyak tersedia di wilayah perdesaan.

Penduduk laki-laki mendominasi pasar tenaga kerja baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Sementara itu menurut jenis kelamin, pasar tenaga kerja masih didominasi oleh kaum pria. Pada Agustus 2018, baik di wilayah perkotaan ataupun perdesaan masih didominasi oleh tenaga kerja laki-laki masing-masing sebesar 71,64 persen dan 83,48 persen. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di wilayah perkotaan sebesar 46,33 persen dan perdesaan sebesar 51,24 persen.

http://malut.bps.go.id

Tabel 2. Persentase Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2016 - 2018

Tingkat Pendidikan	Agustus 2016	Agustus 2017	Agustus 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
<= SD	36,52	37,37	36,93
SMP	17,47	17,40	16,99
SMA Umum	26,68	23,94	24,74
SMA Kejuruan	4,70	5,55	5,34
Diploma I/II/III	3,61	3,03	2,70
Universitas	11,02	12,70	13,29
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2018

Berdasarkan tingkat pendidikan, angkatan kerja di Maluku Utara masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Sebanyak 36,93 persen angkatan kerja di Maluku Utara merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD), tidak tamat SD, atau tidak pernah bersekolah. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,44 poin dibandingkan Agustus 2017 (37,37 persen). Meski demikian, kelompok penduduk ini masih menjadi penyumbang terbesar angkatan kerja di Maluku Utara.

Pasokan angkatan kerja di Maluku Utara masih didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah.

Sementara itu, kelompok penduduk dengan pendidikan SMA umum menyumbang angkatan kerja sebesar 24,74 persen, atau terbesar kedua. Angka tersebut naik 0,80 poin dibandingkan Agustus 2017 sebesar 23,94 persen. Kenaikan ini harus dilihat lebih rinci karena angkatan kerja bukan hanya penduduk yang bekerja, tapi juga terdapat pengangguran di dalamnya. Sebuah keuntungan jika kenaikan tersebut disumbang oleh penduduk yang bekerja. Akan tetapi, menjadi beban jika yang mengalami peningkatan adalah penduduk yang menganggur, seperti penduduk yang baru lulus sekolah tapi belum terserap di lapangan pekerjaan yang tersedia.

https://malut.bps.go.id

PENDUDUK USIA KERJA YANG BEKERJA

a. Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Kategorisasi menurut status pekerjaan bisa menjadi indikator yang menggambarkan dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu daerah. Dengan majunya pembangunan di suatu daerah biasanya terlihat adanya pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan), dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/ bekerja di sektor pertanian.

Gambar 2. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama Provinsi Maluku Utara, Agustus 2018

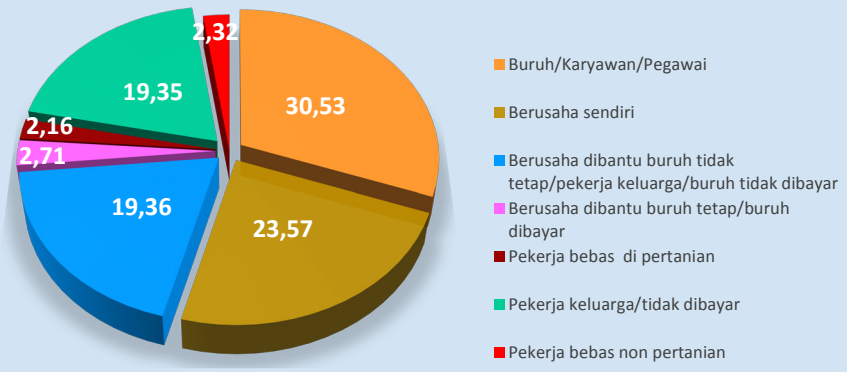

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2018, Diolah

Sepertiga penduduk yang bekerja di Maluku Utara berstatus sebagai buruh/karyawan.

Status Pekerjaan Utama pada Sakernas diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok, yaitu:

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai
5. Pekerja bebas di pertanian
6. Pekerja bebas di non pertanian
7. Pekerja keluarga/tidak dibayar

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2018, tenaga kerja di Maluku Utara di dominasi oleh kelompok buruh/karyawan sebesar 30,53 persen. Kemudian diikuti oleh kelompok berusaha sendiri sebesar 23,57 persen. Adapun pekerja bebas pada sektor pertanian dan bukan sektor pertanian, masing-masing sebesar 2,16 persen dan 2,32 persen. Sementara itu pekerja keluarga atau tidak dibayar masih cukup banyak yaitu sebesar 19,35 persen.

https://malut.bps.go.id

Tabel 3. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama Provinsi Maluku Utara, Agustus 2016-2018

Status Pekerjaan Utama	Agustus 2016	Agustus 2017	Agustus 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	21,32	23,12	23,57
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tdk dibayar	19,35	17,17	19,36
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	3,96	3,07	2,71
Buruh/karyawan/pegawai	32,01	34,98	30,53
Pekerja bebas di pertanian	3,21	3,48	2,16
Pekerja bebas di nonpertanian	2,51	3,36	2,32
Pekerja keluarga/tidak dibayar	17,65	14,82	19,35
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016-2018

Beberapa kelompok status pekerjaan utama pada rentang tahung 2016-2018 berfluktuatif. Pekerja yang berstatus sebagai buruh/ karyawan/pegawai turun menjadi 30,53 persen pada Agustus 2018 dibanding Agustus 2017 sebesar 34,98. Padahal pada periode yang sama setahun yang lalu, persentase buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan dari 32,01 pada Agustus 2016. Adapun pekerja keluarga/tidak dibayar naik 4,53 persen menjadi 19,35 dibandingkan Agustus 2017 sebesar 14,82. Hal ini bisa menjadi salah satu indikasi mulai bergesernya tenaga kerja tak berbayar menjadi tenaga kerja berbayar.

Tabel 4. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama, Klasifikasi Wilayah, dan Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara, Agustus 2018

Status Pekerjaan Utama	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha sendiri	23,50	23,59	26,69	18,19	23,57
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	8,37	23,30	22,68	13,66	19,36
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	3,34	2,49	3,60	1,19	2,71
Buruh/karyawan/pegawai	52,55	22,63	29,91	31,59	30,53
Pekerja bebas di pertanian	0,44	2,78	2,69	1,25	2,16
Pekerja bebas di nonpertanian	3,88	1,76	3,54	0,22	2,32
Pekerja keluarga/tidak dibayar	7,92	23,44	10,89	33,89	19,35
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2018

https://malut.bps.go.id

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi wilayah, lebih dari separuh penduduk yang bekerja di wilayah perkotaan berstatus buruh/ karyawan/pegawai yaitu mencapai 52,55 persen. Adapun kelompok pekerja berstatus berusaha sendiri di wilayah perkotaan sebesar 23,50 persen. Sementara itu, tercatat hanya 0,44 pekerja yang berstatus sebagai pekerja bebas sektor pertanian di wilayah perkotaan.

Sementara di wilayah perdesaan cenderung merata pada kelompok pekerja berstatus berusaha sendiri (23,59 persen), pekerja keluarga/ tidak dibayar (23,44 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap/ dibayar (23,30 persen) dan buruh/karyawan/pegawai (22,63). Namun perlu menjadi perhatian bahwa persentase pekerja yang berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar di wilayah perdesaan cukup dominan.

Berdasarkan jenis kelamin, baik pekerja laki-laki maupun perempuan yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai cukup dominan yaitu sebanyak 29,91 persen untuk laki-laki dan 31,59 persen untuk perempuan. Meski demikian, sebagian besar penduduk perempuan yang bekerja adalah pekerja keluarga/tidak dibayar, yaitu sebesar 33,89 persen.

b. Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan memberikan gambaran sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/ tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Informasi sektoral atau lapangan usaha biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam berbagai literatur pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya pekerja berpindah dari desa ke kota.

Seiring perkembangan konsep dan jenis lapangan usaha, pengklasifikasian lapangan usaha yang digunakan oleh BPS saat ini mengacu pada KBLI 2015. Penyusunan KBLI 2015 merupakan penyempurnaan KBLI 2009 Cetakan III, sehingga terjadinya perubahan dan pergeseran struktur dan judul nomenklatur KBLI 2015 tidak mengubah tatacara dan makna klasifikasi.

Klasifikasi KBLI 2015 terdiri dari struktur pengklasifikasian aktivitas ekonomi yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tatacara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional. Struktur klasifikasi menunjukkan format standar untuk mengelola informasi rinci tentang keadaan ekonomi, sesuai prinsip-prinsip dan persepsi ekonomi.

Dasar penyusunan KBLI 2015 adalah KBLI 2009 Cetakan III dan ISIC Rev.4 yang disesuaikan dengan ASEAN Common Industrial Classification (ACIC), dan East Asian Manufacturing Statististics (EAMS) dan dikembangkan rinci sampai 5 (lima) digit untuk kegiatan yang spesifik di Indonesia.

Perubahan struktur berupa pergeseran atau pengelompokkan suatu kegiatan dari satu klasifikasi ke klasifikasi lainnya, dan penambahan klasifikasi baru yang disebabkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi, memungkinkan untuk terbentuknya kelompok yang berdiri sendiri atau digabungkan dengan kategori lain yang lebih sesuai. Oleh karena itu, klasifikasi lapangan usaha yang digunakan dalam publikasi ini adalah menurut KBLI 2015 dengan jumlah lapangan usaha sebanyak 17 kategori yang dirinci sebagai berikut:

- Kategori A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- Kategori B Pertambangan dan Penggalian;
- Kategori C Industri Pengolahan;
- Kategori D Pengadaan Listrik dan Gas;

https://malut.bps.go.id

- Kategori E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang;
- Kategori F Konstruksi;
- Kategori G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- Kategori H Transportasi dan Pergudangan;
- Kategori I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- Kategori J Informasi dan Komunikasi;
- Kategori K Jasa Keuangan dan Ausransi;
- Kategori L Real Estat;
- Kategori M,N Jasa Perusahaan;
- Kategori O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
- Kategori P Jasa Pendidikan;
- Kategori Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
- Kategori R,S,T,U Jasa Lainnya.

Maluku Utara masih merupakan provinsi dengan karakter agraris di mana sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian.

https://malut.bps.go.id

Gambar 3. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara, Agustus 2018

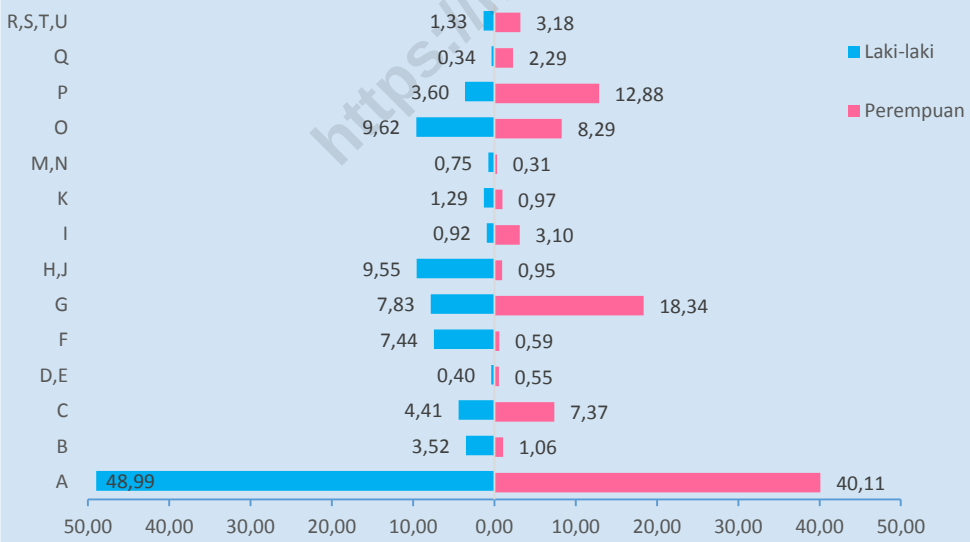

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2018, Diolah

Selain kategori A, penduduk laki-laki banyak bekerja pada kategori O. Sedangkan penduduk perempuan banyak bekerja pada kategori G.

Kategori A (Pertanian Kehutanan dan Perikanan) adalah lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Maluku Utara. Pada Agustus 2018, penduduk yang bekerja pada kategori ini tercatat sebesar 45,73 persen. Lapangan usaha terbesar kedua di Maluku Utara adalah kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) dengan persentase sebesar 11,70 persen.

Menurut jenis kelamin, lapangan usaha terbesar baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan yang bekerja ada pada kategori A (Pertanian Kehutanan dan Perikanan), yaitu 48,99 persen pada penduduk laki-laki dan 40,11 persen pada penduduk perempuan. Perbedaan cukup signifikan terlihat pada lapangan usaha terbesar kedua. pada penduduk laki-laki, lapangan usaha terbesar kedua ada pada kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) sebesar 9,62 persen. Sedangkan pada penduduk perempuan, lapangan usaha terbesar kedua ada pada kategori G(Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor), yaitu mencapai 18,34 persen.

Tabel 5. Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Klasifikasi Wilayah dan Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara, Agustus 2018

Lapangan Pekerjaan Utama	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9,56	58,70	49,00	40,11	45,73
B Pertambangan dan Penggalian	2,04	2,82	3,52	1,06	2,61
C Industri Pengolahan	5,50	5,50	4,41	7,37	5,50
D, E Pengadaan Listrik dan Gas serta air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang	1,20	0,19	0,40	0,55	0,46
F Konstruksi	6,86	4,23	7,44	0,59	4,92
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	17,45	9,63	7,83	18,34	11,70
H, J Transportasi dan Pergudangan, serta Informasi dan Komunikasi	14,38	3,53	9,55	0,96	6,39
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,98	0,56	0,92	3,10	1,72
K Jasa Keuangan dan Asuransi	3,11	0,47	1,29	0,97	1,17
M,N Jasa Perusahaan	1,38	0,30	0,75	0,31	0,59
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20,89	4,92	9,62	8,29	9,13
P Jasa Pendidikan	6,72	7,12	3,60	12,88	7,01
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,02	0,71	0,34	2,29	1,05
R,S,T,U Jasa Lainnya	3,90	1,33	1,33	3,18	2,01
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2018

https://malut.bps.go.id

Jika ditinjau menurut klasifikasi wilayah, penyerapan tenaga kerja di perdesaan masih didominasi oleh lapangan usaha pada kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), yaitu mencapai 58,70 persen. Kemudian diikuti oleh kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) pada posisi terbesar kedua, yaitu sebesar 9,63 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja di perkotaan paling besar disumbang oleh kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor), yaitu sebesar 17,45 persen. Adapun kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) menyumbangkan 14,38 persen pada pasar tenaga kerja perkotaan.

c. Penduduk Yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Seseorang dikatakan sebagai pekerja penuh waktu (Full time Worker) apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu yang lalu

Di Indonesia seseorang dikatakan sebagai pekerja penuh waktu (*Full Time Worker*) apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu. Jumlah jam kerja tersebut merupakan kumulatif selama satu minggu. Bila pekerja memiliki jumlah jam kerja kurang dari jumlah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan lain itu termasuk setengah penganggur. Namun jika pekerja memiliki jumlah jam kerja kurang dari jumlah jam kerja normal dan tidak ingin mencari pekerjaan lain atau sudah merasa cukup maka termasuk pekerja paruh waktu (*Part Time Worker*).

malut.bps.go.id

Tabel 6. Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerja berdasarkan Jumlah Jam Kerja Provinsi Maluku Utara, Agustus 2016-2018

Status Pekerja	Agustus 2016	Agustus 2017	Agustus 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk yang Bekerja	503 479	488 715	515 615
Pekerja tidak penuh (< 35 jam)	145 662	157 787	157 582
1. Setengah penganggur	36 402	48 404	40 120
2. Pekerja paruh waktu	109 260	109 383	117 462
Tingkat pekerja tidak penuh (%)	28,93	32,29	30,56
1. Tingkat setengah penganggur (%)	7,23	9,90	7,78
2. Tingkat pekerja paruh waktu (%)	21,70	22,38	22,78

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016-2018

Dalam tiga tahun terakhir, tingkat pekerja tidak penuh di Maluku Utara mengalami fluktuasi.

Selama tiga tahun terakhir, tingkat pekerja tidak penuh di Maluku Utara berfluktuasi, yaitu dari 28,93 persen pada Agustus 2016, naik menjadi 32,29 persen pada Agustus 2017 lalu kemudian turun menjadi 30,56 persen pada Agustus 2018. Pekerja tidak penuh ini terdiri dari pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Dibanding periode sebelumnya (Agustus 2017), tingkat pekerja setengah penganggur turun menjadi 7,78 persen pada Agustus 2018. Sedangkan tingkat pekerja paruh waktu pada Agustus 2018 naik 0,4 poin menjadi 22,78 persen dibandingkan Agustus 2017 sebesar 22,38 persen.

Tabel 7. Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerja berdasarkan Jumlah Jam Kerja, Klasifikasi Wilayah dan Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara, Agustus 2018

Status Pekerja	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk yang Bekerja	136 061	379 554	326 069	189 546	515 615
Pekerja tidak penuh (< 35 jam)	27 541	130 041	74 847	82 735	157 582
1. Setengah penganggur	6 467	33 653	25 115	15 005	40 120
2. Pekerja paruh waktu	21 074	96 388	49 732	67 730	117 462
Tingkat pekerja tidak penuh (%)	20,24	34,26	22,95	43,65	30,56
1. Tingkat setengah penganggur (%)	4,75	8,87	7,70	7,92	7,78
2. Tingkat pekerja paruh waktu (%)	15,49	25,40	15,25	35,73	22,78

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2018

https://maut.bps.go.id

Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pekerja tidak penuh pada penduduk perempuan jauh lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu sebesar 43,65 persen berbanding 22,95 persen. Tabel 7 juga menunjukkan bahwa pekerja perempuan lebih memilih menjadi pekerja paruh waktu yaitu sebesar 35,73 persen. Jika dilihat berdasarkan tempat tinggalnya, tingkat pekerja tidak penuh di wilayah perdesaan (34,26 persen) lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan (20,24 persen).

d. Penduduk yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan

Dalam analisis ketenagakerjaan penduduk yang bekerja juga dapat dibedakan menurut pendidikan. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian atau keterampilan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang tidak menjamin semakin mudah baginya untuk memperoleh

pekerjaan apalagi yang sesuai dengan pendidikannya. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menyebabkan pasar tenaga kerja yang dimasuki seseorang yang berpendidikan tinggi tak jarang menjadi tidak tepat. Sebaliknya, karena tingginya permintaan tenaga kerja pada sektor informal atau jenis pekerjaan yang hanya mengandalkan fisik dan pendidikan rendah, maka mereka yang berpendidikan rendah justru dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Tabel 8. Persante Penduduk yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan Povinsi Maluku Utara, Agustus 2016-2018

Tingkat Pendidikan	Agustus 2016	Agustus 2017	Agustus 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
<= SD	37,37	38,58	37,87
SMP	18,12	17,68	17,47
SMA Umum	26,19	22,85	23,65
SMA Kejuruan	4,66	5,38	5,23
Diploma I/II/III	3,49	2,95	2,65
Universitas	10,17	12,57	13,14
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016-2018

https://malut.bps.go.id

Berdasarkan tabel 8 di atas, diketahui bahwa dari tahun 2016 hingga 2018 sebagian besar pekerja di Maluku Utara berpendidikan SD ke bawah dan SMA umum. Pada Agustus 2018 pekerja yang berpendidikan SD ke bawah berkurang menjadi 37,87 persen dibandingkan Agustus 2017 sebesar 38,58 persen. Sedangkan persante pekerja lulusan SMA Umum meningkat menjadi 23,65 persen pada Agustus 2018 dibandingkan Agustus 2017 sebesar 22,85 persen.

Penduduk yang bekerja di Maluku Utara didominasi penduduk berpendidikan dasar (SMP kebawah).

Di sisi lain tenaga kerja lulusan perguruan tinggi menampilkan hasil berbeda. Pekerja lulusan Diploma turun menjadi 2,65 persen pada Agustus 2018 dibandingkan Agustus 2017. Sedangkan pekerja yang berijazah minimal S1 atau Universitas naik 0,57 poin menjadi 13,14 pada Agustus 2018.

Namun secara umum penduduk yang bekerja di Maluku Utara masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan dasar (SMP kebawah) yaitu sebesar 55,34 persen. Angka tersebut turun 0,92 poin jika dibandingkan Agustus 2017 sebesar 56,26. Adapun pekerja lulusan SMK tercatat hanya sebesar 5,23 persen, turun 0,15 poin dibandingkan Agustus 2017 sebesar 5,38 persen.

Tabel 9. Persante Penduduk yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan, Klasifikasi Wilayah dan Jenis Kelamin Povinsi Maluku Utara, Agustus 2018

Tingkat Pendidikan	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<= SD	18,57	44,78	35,61	41,74	37,87
SMP	14,35	18,58	19,47	14,02	17,47
SMA Umum	29,12	21,70	26,89	18,09	23,65
SMA Kejuruan	11,40	3,01	5,62	4,55	5,23
Diploma I/II/III	3,29	2,42	1,59	4,47	2,65
Universitas	23,27	9,51	10,82	17,13	13,14
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2018

Menurut daerah tempat tinggal, lebih dari setengah penduduk yang bekerja di wilayah perdesaan berpendidikan SD ke bawah, yaitu mencapai 44,78 persen. Sementara di wilayah kota, kelompok terbesar penduduk yang bekerja adalah berpendidikan SMA Umum, yaitu sebesar 29,12 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk yang bekerja baik laki-laki maupun perempuan, masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu 35,61 persen untuk laki-laki dan 41,74 persen untuk perempuan.

https://malut.bps.go.id

INDIKATOR PENGANGGURAN

Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibandingkan lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/ mempersiapkan usaha.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/mempersiapkan usaha. Tingginya angka TPT mencerminkan adanya kegagalan dalam pasar kerja untuk menyerap sejumlah angkatan kerja.

TPT atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran ini harus dilihat secara hati-hati dan tidak bisa digunakan serta merta sebagai pengukuran kesulitan ekonomi. Tingkat kemiskinan “tidak selalu” berkorelasi dengan tingkat pengangguran. Sebagai contoh seseorang dengan kondisi latar belakang ekonomi dan pendidikan yang baik cenderung memilih pekerjaan pada tingkat pendapatan dan status

sosial yang lebih tinggi dan akan memilih menganggur daripada bekerja meskipun kadang berarti melewatkan lowongan pekerjaan yang bisa didapatkan dengan mudah di depan mata. Sementara penduduk miskin cenderung mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan karena tuntutan yang tinggi dalam upaya mempertahankan hidup.

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan kesejahteraan ekonomi. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan secara aktif atau tidak mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja dan indikasi kegagalan mencari pekerjaan.

Dari 100 orang angkatan kerja di Maluku Utara, sekitar 4-5 orang diantaranya adalah penganggur.

https://malut.bps.go.id

Gambar 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku Utara, Agustus 2016-2018

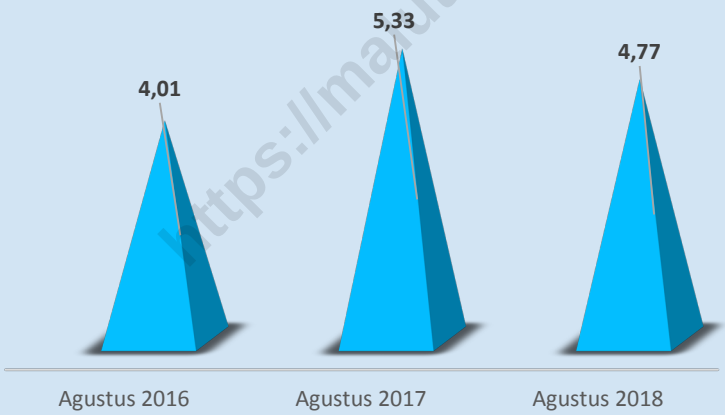

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016-2018, Diolah

Pada Agustus 2018, TPT Maluku Utara adalah sebesar 4,77 persen, yang artinya dari 100 orang angkatan kerja di Maluku Utara terdapat sekitar 4-5 orang penganggur. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, TPT di Maluku Utara berfluktuasi. TPT Maluku Utara pada Agustus 2016 sebesar 4,01, kemudian meningkat menjadi 5,33 persen pada Agustus 2017. Keadaan tingkat pengangguran menunjukkan sedikit membaik, dimana TPT Agustus 2018 turun 0,56 poin menjadi 4,77 dibandingkan Agustus 2017.

Tabel 10. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Tingkat Pendidikan, Klasifikasi Wilayah Provinsi Maluku Utara, Agustus 2018

Tingkat Pendidikan	Klasifikasi Wilayah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. <= SD	2,80	2,30	1,19	4,03	2,36
2. SMP	2,92	1,94	1,45	3,78	2,15
3. SMA Umum	10,34	8,28	8,10	11,08	8,95
4. SMA Kejuruan	2,25	12,35	5,30	9,86	6,81
5. Diploma I/II/III	5,82	6,96	3,10	8,60	6,59
6. Universitas	4,54	6,95	4,02	7,74	5,84
Total	5,57	4,48	3,76	6,47	4,77

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2018

Menurut klasifikasi wilayah, tingkat pengangguran di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Pada Agustus 2018 TPT perkotaan adalah sebesar 5,47 persen, sedangkan TPT perdesaan sebesar 4,48 persen.

Berdasarkan tingkat pendidikan secara umum tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada kelompok SMA Kejuruan. Sedangkan dilihat menurut wilayah, maka tingkat pengangguran tertinggi berada pada kelompok lulusan SMA untuk wilayah perkotaan, yaitu sebesar 10,45 persen. Adapun tingkat pengangguran tertinggi di wilayah perdesaan berada pada kelompok SMA Kejuruan yaitu sebesar 12,35 persen. Namun secara keseluruhan tingkat pengangguran terendah baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan justru pada kelompok tingkat pendidikan dasar, yaitu SMP ke bawah.

Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran terbuka pada penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pada Agustus 2018, tercatat tingkat pengangguran perempuan sebesar 6,47 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada penduduk laki-laki adalah 3,76 persen atau sekitar separuh dari tingkat pengangguran terbuka penduduk perempuan.

Tingkat pengangguran tertinggi adalah lulusan SMK, yaitu sebesar 8,95 persen pada Agustus 2018.

https://malut.bps.go.id

https://malut.bps.go.id

LAMPIRAN
TABEL DAN GRAFIK

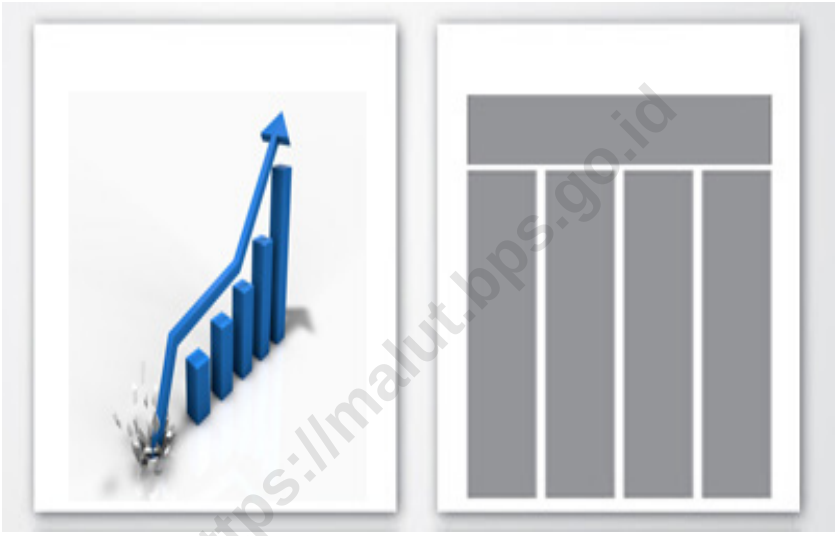

https://malut.bps.go.id

Tabel Lampiran 1. Jumlah Penduduk Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2018

Laki-laki + Perempuan

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmaher Barat	110.717	112.722	114.502	116.513
Halmahera Tengah	49.807	51.315	52.813	54.190
Kepulauan Sula	95.285	97.177	99.196	100.967
Halmahera Selatan	219.836	223.460	227.280	231.217
Halmahera Utara	180.100	183.596	187.104	190.531
Halmahera Timur	85.188	87.680	90.070	92.618
Pulau Morotai	60.727	62.412	64.001	65.573
Pulau Taliabu	50.709	51.316	51.928	52.503
Kota Ternate	212.997	218.028	223.111	228.105
Kota Tidore kepulauan	96.979	98.206	99.337	100.415
Maluku Utara	1.162.345	1.185.912	1.209.342	1.232.632

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Maluku Utara 2010-2020

https://malut.bps.go.id

Gambar Lampiran 1. Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara, 2018

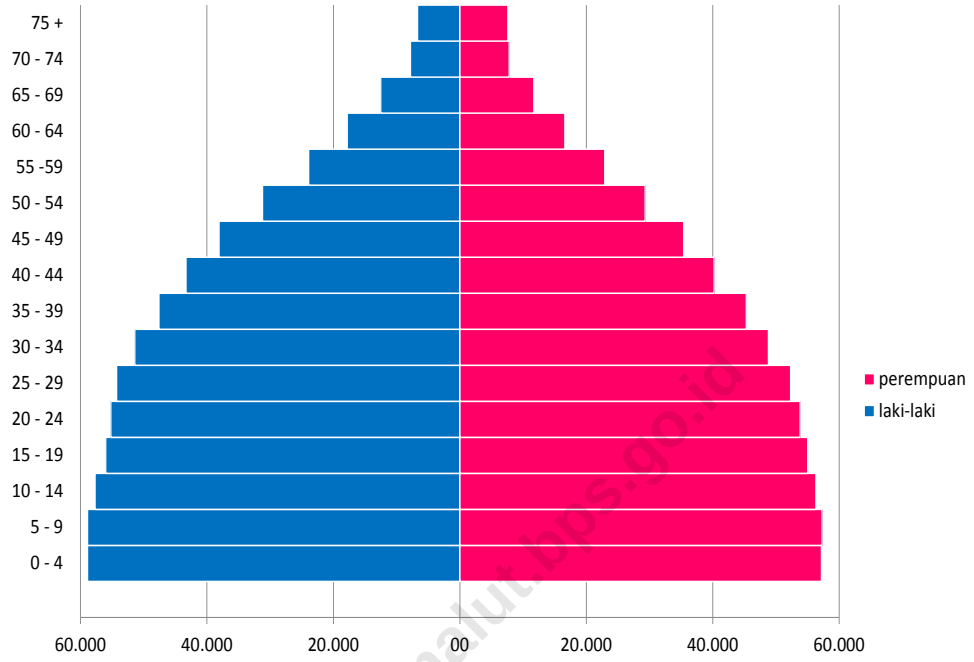

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Maluku Utara

https://malut.bps.go.id

Tabel Lampiran 2. Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Maluku Utara, Agustus 2016-2018

Jenis Kegiatan Utama	Agustus 2016	Agustus 2017	Agustus 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja (15+ tahun)	792 478	811 067	830 307
Angkatan Kerja	524 526	516 231	541 446
Bekerja	503 479	488 715	515 615
Pengangguran	21 047	27 516	25 831
Bukan Angkatan Kerja	267 952	294 836	288 861
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,19	63,65	65,21
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,01	5,33	4,77
Pekerja Tidak Penuh	145 662	157 787	157 582
Setengah Penganggur	36 402	48 404	40 120
Paruh Waktu	109 260	109 383	117 462

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016-2018

https://malut.bps.go.id

Gambar Lampiran 2. Penduduk Usia Kerja Provinsi Maluku Utara menurut Jenis Kegiatan Utama, Agustus 2016-2018

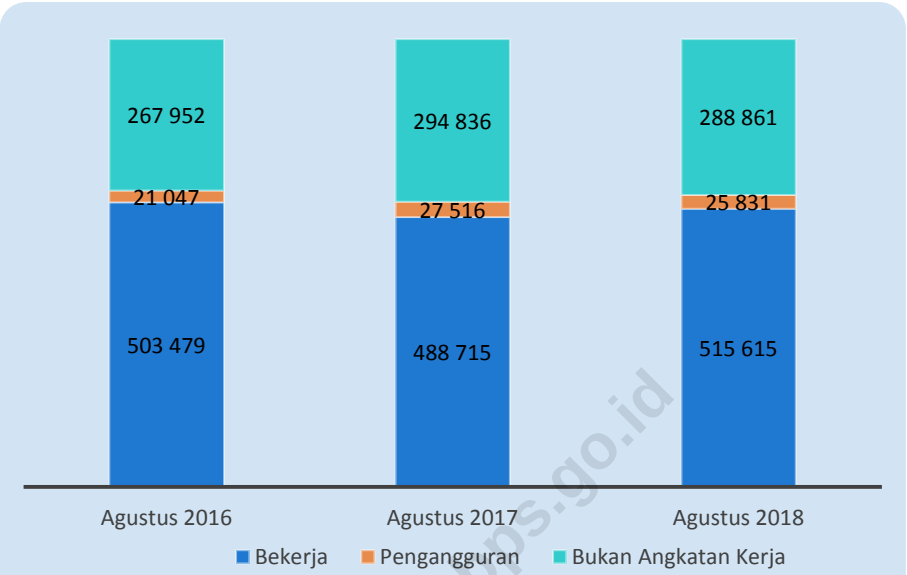

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016-2018, Diolah

https://malut.bps.go.id

Tabel Lampiran 3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku Utara menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2016-2018

Tingkat Pendidikan	Agustus 2016	Agustus 2017	Agustus 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1. <= SD	1,79	2,28	2,36
2. SMP	0,46	3,84	2,15
3. SMA Umum	5,75	9,65	8,95
4. SMA Kejuruan	4,85	8,15	6,81
5. Diploma I/II/III	7,17	7,92	6,59
6. Universitas	11,44	6,35	5,84
Total	4,01	5,33	4,77

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2016-2018

https://malut.bps.go.id

Tabel Lampiran 4. Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kegiatan, TPAK, TPT
Provinsi Maluku Utara, Agustus 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan					Penduduk Usia 15+ Tahun	TPAK	TPT
	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Halmahera Barat	50 062	1 688	7 233	16 143	4 119	79 245	65,30	3,26
Halmahera Tengah	21 836	1 050	3 007	8 594	598	35 085	65,23	4,59
Kepulauan Sula	40 115	2 263	6 316	11 485	5 111	65 290	64,91	5,34
Halmahera Selatan	102 883	4 375	8 938	27 924	3 387	147 507	72,71	4,08
Halmahera Utara	74 765	3 944	16 261	27 527	5 177	127 674	61,65	5,01
Halmahera Timur	44 119	1 639	4 096	11 544	1 018	62 416	73,31	3,58
Pulau Morotai	24 953	1 588	4 430	10 069	1 703	42 743	62,09	5,98
Pulau Taliabu	23 186	1 344	2 129	5 641	962	33 262	73,75	5,48
Kota Ternate	90 493	5 679	27 943	33 836	9 357	167 308	57,48	5,91
Kota Tidore Kepulauan	43 203	2 261	7 068	13 764	3 481	69 777	65,16	4,97
Maluku Utara	515 615	25 831	87 421	166 527	34 913	830 307	65,21	4,77

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2018

https://malut.bps.go.id

GLOSARIUM

- Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah dalam teritorial Negara Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih, atau kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bermaksud menetap lebih dari 6 (enam) bulan.

- Terkait ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi:
  - Penduduk Usia Kerja (PUK), yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
  - Penduduk Bukan Usia Kerja, yaitu penduduk yang berusia 0-14 tahun.

- Penduduk Usia Kerja terdiri atas Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

- Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

- Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

- Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya.

- Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.

- Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 yang mengacu pada *the International Standard of Industrial Classification* (ISIC).

- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.

https://malut.bps.go.id

Sensus Penduduk 2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://malut.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA
Jl. Stadion No.65 Kec. Ternate Tengah, Ternate - 97712
Telp/Fax. (0921)-3127878 / 31236301
e-mail : bps8200@bps.go.id | http://malut.bps.go.id

ISSN 2654-9638
9 772654 963000